

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pengolahan data dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya yang ada di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2019 (sebelum pandemi *covid-19*) dan 2020-2022 (selama pandemi *covid-19*) dengan menggunakan 5 (lima) rasio yang dapat mengukur kinerja keuangan dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Kondisi sosial pandemi *Covid-19* sangat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan terjadinya pembatasan sosial yang menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat mengoptimalkan potensi pendapatan daerahnya.
2. Dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya yang ada di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2019 (sebelum pandemi *covid-19*) dan 2020-2022 (selama pandemi *covid-19*) menunjukkan pola hubungan atau berada pada kriteria yang dominan instruktif yang mana pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer pusat dan provinsi dan belum mampu melaksanakan fungsi otonomi daerah secara finansial. Akan tetapi untuk pemerintah daerah Kota Padang saat sebelum pandemi dan saat terjadinya pandemi kemandirian keuangan pemerintah daerahnya berada pada kriteria yang konsultatif dimana dianggap siap melaksanakan fungsi otonomi daerah secara finansial

karena adanya campur tangan pemerintah pusat sudah berkurang dan fungsi pemerintah pusat hanya memberikan konsultasi atau arahan.

3. Dilihat dari rasio efektivitas, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya yang ada di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2019 (sebelum pandemi *covid-19*) rata-rata telah dapat memaksimalkan target realisasi Pendapatan Asli Daerahnya dan untuk tahun 2020-2022 (selama pandemi *covid-19*) dominan pemerintah daerah belum dapat mengoptimal potensi sumber Pendapatan Asli Daerahnya dikarenakan keadaan sosial yang sedang terjadi.
4. Dilihat dari rasio efisiensi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya yang ada di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2019 (sebelum pandemi *covid-19*) dan 2020-2022 (selama pandemi *covid-19*) dominan belum dapat secara efisien meminimalisir belanja daerah. Realisasi belanja daerah masih tinggi dibandingkan realisasi pendapatan daerah.
5. Dilihat dari rasio aktivitas, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya yang ada di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2019 (sebelum pandemi *covid-19*) dan 2020-2022 (selama pandemi *covid-19*) dalam mengeluarkan belanja daerah nya persentase belanja operasi lebih tinggi dibandingkan persentase belanja modalnya. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah belum dapat memaksimalkan sarana dan prasarana bagi kepentingan masyarakatnya.
6. Dilihat dari rasio pertumbuhan, keadaan sosial wabah pandemi *Covid-19* sangat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Madya yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan pada

tabel olahan data yang menunjukkan dominannya pertumbuhan negatif pada setiap rasio pertumbuhan.

7. Secara garis besar, pada variabel rasio kinerja keuangan yang diuji melalui uji beda *t Paired Sample t-Test* dan uji *Wilcoxon Signed Ranks Test* didapatkan kesimpulan bahwasannya terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya yang ada di Provinsi Sumatera Barat pada saat sebelum terjadinya pandemi *Covid-19* dengan selama terjadinya pandemi *Covid-19* untuk rasio efektivitas dan rasio aktivitas (rasio belanja operasi dan rasio belanja modal). Akan tetapi untuk rasio kinerja keuangan dengan variabel Rasio Kemandirian dan Rasio Efisiensi tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya yang ada di Provinsi Sumatera Barat baik pada sebelum terjadinya pandemi *Covid-19* maupun selama terjadinya pandemi *Covid-19*.

5.2. SARAN

Setelah melakukan pengolahan data serta melihat dan memperhatikan hasil dari analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya yang ada di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2019 (sebelum pandemi *covid-19*) dan 2020-2022 (selama pandemi *covid-19*) dengan menggunakan 5 (lima) rasio yang dapat mengukur kinerja keuangan, berikut saran-saran yang dapat disampaikan:

1. Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Madya yang ada di Provinsi Sumatera Barat harus dapat mengoptimalkan potensi sumber pendapatan

daerahnya yang dapat dimanfaatkan dan sekiranya dapat menambah pendapatan daerahnya, sehingga kebergantungan terhadap transfer dari pihak lain baik pusat maupun provinsi.

2. Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Madya yang ada di Provinsi Sumatera Barat dapat menyusun strategi untuk menyeimbangkan belanja daerahnya antara belanja operasi dan belanja modal. Dikarenakan, hal tersebut dapat memaksimalkan sarana dan prasarana umum bagi kepentingan masyarakat yang mana dapat meningkatkan sistem perekonomian yang mana akan menjadi lirikan bagi investor untuk menanamkan modalnya dan meningkatkan pendapatan daerah seperti melalui pajak atau retribusi masuk objek wisata.

